

Efektivitas Peran ASEAN Dalam Penanganan Kudeta Myanmar Tahun 2021

Effectiveness of ASEAN'S Role Handling the 2021 Myanmar Coup

Kevin Satria Hidayat^{a,1}, Helga Yohana Simatupang^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hubungan Internasional UPU, Jl. K.L. Yos Sudarso KM 6.5 Tj. Mulia, Medan, 20241, Indonesia
kevinsatriahidayat28192@gmail.com¹, helgayohana@potensi-utama.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran organisasi internasional ASEAN dalam penanganan kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar serta untuk mengetahui bagaimana proses pencapaian perdamaian yang dilakukan oleh ASEAN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan bahan penelitian primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan penelitian tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan bahan penelitian kedalam bentuk kalimat sederhana yang logis sehingga nantinya memperoleh solusi terkait suatu permasalahan internasional. Menggunakan teori sekuritisasi, kepentingan nasional, dan keamanan internasional sebagai konsep akan mempermudah penulis mengerjakan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN selaku organisasi regional, tidak dapat melakukan banyak hal, karena prinsip non-intervensi yang dianut oleh organisasi regional tersebut. Prinsip non-intervensi di ASEAN dapat dimaknai sebagai salah satu usaha untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota ASEAN. Segala hal yang terjadi di dalam negeri masing-masing negara anggota, terutama yang menyangkut politik, tidak boleh diganggu oleh negara anggota ASEAN.

Kata Kunci : Kudeta Militer Myanmar, ASEAN, Sekuritisasi, Kepentingan Nasional, Keamanan Internasional

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the role of ASEAN international organizations in handling the coup carried out by the Myanmar military junta and to find out how the process of achieving peace by ASEAN. This research is a type of normative research using primary and secondary research materials obtained from literature studies. The research materials are then analyzed using descriptive qualitative analysis techniques to describe the research materials into simple logical sentences so as to obtain solutions related to an international problem. Using the theory of securitization, national interest, and international security as concepts will make it easier for the author to do this research. The results of this study show that ASEAN as a regional organization, cannot do much, because of the principle of non-intervention adopted by the regional organization. The principle of non-intervention in ASEAN can be interpreted as an attempt not to interfere in the internal affairs of each ASEAN member. All things that happen in the country of each member country, especially those related to politics, should not be disturbed by ASEAN member countries.

Keywords : Myanmar Military Coup, ASEAN, Securitization, National Interest, International Security

Disubmit: 10 Januari 2024

Info Artikel :
Direview: 05 Februari 2024

Diterima : 08 April 2024

Copyright © 2024 – Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar melakukan kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil dan menangkap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi serta pejabat pemerintah lainnya. Latar belakang kudeta ini melibatkan ketegangan politik antara militer dan pemerintahan sipil yang terpilih. Sejak diberlakukannya reformasi politik pada 2011, Myanmar telah bergerak menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Pada pemilihan umum November 2020, partai Aung San Suu Kyi, National League

for Democracy (NLD), memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Meskipun pemilu tersebut diakui secara internasional sebagai bebas dan adil, militer Myanmar, yang juga dikenal sebagai Tentara Myanmar atau Tatmadaw, menolak hasilnya. Pertentangan antara militer dan pemerintahan sipil semakin meningkat setelah pemilu. Militer mengklaim adanya kecurangan pemilu tanpa memberikan bukti yang cukup, sementara pemerintah terpilih menyangkal tuduhan tersebut. Spanjang Januari 2021, ketegangan politik meningkat ketika militer mulai mengancam untuk mengambil alih kekuasaan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Pada tanggal 1 Februari 2021, militer mengumumkan darurat darurat selama satu tahun dan menyatakan bahwa kepemimpinan militer, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, akan menggantikan pemerintahan sipil. Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat pemerintah lainnya ditangkap. Kudeta ini menimbulkan protes massal di Myanmar, dengan rakyat yang menuntut pemulihan demokrasi dan pembebasan tahanan politik. Peristiwa tersebut menciptakan ketidakstabilan politik dan kemanusiaan di Myanmar, dengan banyak pihak internasional mengecam tindakan militer dan mendesak untuk mengembalikan pemerintahan sipil

Suasana kudeta militer yang semakin memburuk membuat banyak orang turun ke jalan di beberapa kota utama Myanmar. Mereka dengan keras menolak kudeta militer dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi. Menurut Asosiasi untuk Bantuan Tahanan Politik, hingga 11 April 2021, jumlah korban tewas sebanyak 701 warga sipil, 48 di antaranya adalah anak di bawah umur, dan lebih dari 2.800 demonstran telah ditangkap oleh tentara, namun junta militer melalui juru bicaranya mengklaim jumlah korban dari aksi tersebut tidak sebanyak itu, melainkan hanya 248 orang. Menyusul aksi demokratis tersebut, tentara Myanmar mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan melarang warganya untuk membentuk perkumpulan, dan hanya mengizinkan lima orang untuk bertemu (Imanuddin Imran, 2022). Myanmar berada di Asia Tenggara. Itu berbatasan dengan Tiongkok di utara, Laos di timur, Thailand di tenggara, dan India dan Bangladesh di barat. Negara dengan luas lebih dari 676.578 meter persegi ini sebelumnya bernama Burma, tetapi pada tahun 1989 diganti menjadi Myanmar. Berbagai etnis minoritas tinggal di Myanmar, termasuk Burman, Chin, Kachin, Karen, Shan, dan lainnya.



Gambar 1.1 Peta Myanmar

Sumber: <https://internasional.kompas.com/read/2022/05/31/123100070/myanmar-negara-asean-yang-terletak-paling-barat-dan-utara>

Penulis berpendapat bahwa penting untuk menganalisis peran dan efektivitas ASEAN dalam menyelesaikan kudeta di Myanmar yang dinilai sangat penting karena adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Penulis menilai bahwa konflik ini perlu dikaji lebih dalam karena ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara turut bertanggung jawab atas konflik yang terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia dan krisis demokrasi merupakan poin penting dimana ASEAN harus mengambil sikap tegas terhadap anggotanya. Sikap tegas ini juga bukan karena tanggung jawab semata, tetapi juga tekanan dari PBB dan masyarakat internasional.

Penelitian terdahulu yang mengkaji hal yang sama dapat ditemukan dalam disertasi Imanuddin Imran di bidang hukum internasional yang berjudul "Keabsahan Kudeta Militer Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional". Penelitian ini fokus mengkaji kudeta militer Myanmar dari perspektif hukum internasional. Namun, dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bagaimana efektivitas ASEAN dalam menangani kudeta militer di Myanmar mengingat ASEAN merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab terhadap negara-negara anggotanya (Imanuddin Imran, 2022).

Mengingat bahwa fenomena yang dibahas dalam penelitian ini belum lama terjadi dan masih berlangsung, penelitian yang dilakukan penulis adalah nyata. Data yang dikumpulkan oleh penulis melalui jurnal, media elektronik, buku, dan artikel adalah sumber yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif deskriptif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sekuritisasi

Dalam buku mereka "Keamanan: A Framework for Analysis", Buzan, Waever dan Wilde menjelaskan bahwa studi keamanan adalah tentang kelangsungan hidup (Buzan, Waever dan Wilde 1998). Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa studi keamanan tidak hanya mengenai masalah negara dan militer, tetapi juga mengenai beberapa bidang lain, yaitu ekonomi, politik, sosial dan lingkungan. Dalam kajian yang sama, ketiganya juga merumuskan tiga tahapan dalam proses sekuritisasi sebuah isu, yaitu tahap non-politisasi, politisasi dan sekuritisasi (Ralf Emmers, 2017).

Sebuah isu berada dalam tahap non-politisasi ketika isu tersebut menjadi bagian dari perdebatan masyarakat dan belum menjadi perdebatan pemerintah. Selanjutnya, isu tersebut akan memasuki proses politik ketika isu tersebut menjadi topik pembicaraan, negosiasi, dan perdebatan di tingkat pemerintahan. Terakhir, sebuah isu dikatakan aman ketika para aktor, baik negara maupun non-negara, telah sepakat bahwa ada ancaman dan diperlukan tindakan darurat untuk mengatasinya (Barry Buzan, 1998).

Aktor sekuritisasi juga dapat menggunakan tindak tutur sebagai alat untuk mengubah suatu masalah menjadi ancaman keamanan dan untuk meyakinkan serta memperingatkan publik akan bahaya yang ditimbulkan oleh ancaman tersebut. Tindakan tersebut diharapkan dapat memobilisasi opini publik dan memberikan kesempatan kepada aktor sekuritisasi untuk memobilisasi kekuatan negara dalam merumuskan peraturan untuk menghentikan ancaman tersebut. Penggunaan tindak tutur sangat penting dalam teori sekuritisasi Copenhagen dan dapat menentukan berhasil atau tidaknya proses sekuritisasi.

Lebih lanjut, Copenhagen School juga dapat menjelaskan dua hal penting yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi, yaitu kapan dan bagaimana suatu isu dapat disebut sebagai ancaman. Copenhagen School juga menjelaskan bahwa sebuah proses sekuritisasi dianggap baik dan berhasil ketika masyarakat, sebagai referen atau pihak yang terancam, pada akhirnya percaya akan ancaman isu tersebut. Secara umum, teori sekuritisasi dan de-sekuritisasi Copenhagen School dapat digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting dalam proses sekuritisasi dan de-sekuritisasi, yaitu:

1. Siapa dan apa objek referensinya? Jawaban dari pertanyaan ini dapat berupa individu atau kelompok individu. Selain itu, beberapa isu termasuk keamanan nasional, lingkungan dan ekonomi yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia.
2. Siapa aktor keamanannya? Jawaban dari pertanyaan ini dapat berupa pemerintah atau non-pemerintah.
3. Siapa saja aktor yang terlibat dalam penghilangan rasa aman? Jawaban atas pertanyaan ini dapat berupa aktor manapun, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang menyatakan bahwa ancaman tersebut tidak lagi mengancam keamanan individu, kelompok, atau aspek apapun dari kelangsungan hidup manusia.
4. Bagaimana proses penghilangan gelar berlangsung? Pertanyaan ini berfokus pada bahasa sebagai alat untuk mengkomunikasikan pesan, yang digunakan oleh para aktor pemberi judul untuk meyakinkan subjek referensi tentang ancaman yang ditimbulkan oleh masalah atau isu tertentu.

Meskipun teori sekuritisasi dan desekuritisasi dari Copenhagen School merupakan teori yang penting bagi perkembangan studi keamanan, namun teori ini belum sepenuhnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proses sekuritisasi, seperti yang dikemukakan oleh Caballero-Anthony, Emmers, dan Acharya. Pertama, Copenhagen School tidak menjawab pertanyaan mengenai motivasi atau latar belakang dari sebuah proses atau upaya sekuritisasi (Mely Caballero-Anthony, 2006).

Sebuah proses sekuritisasi pada akhirnya akan membutuhkan langkah politik yang harus diambil oleh para pelaku sekuritisasi, terutama pemerintah. Langkah politik dalam proses sekuritisasi membutuhkan pengamanan sumber daya, yang mana hal ini membutuhkan dukungan dari pihak-pihak atau aktor-aktor kunci dalam sekuritisasi. Sebaliknya, desekuritisasi juga dilatarbelakangi oleh motivasi para aktor dalam proses tersebut. Sebagai contoh, para politisi dan elit militer dapat menggunakan proses sekuritisasi untuk meningkatkan nilai anggaran militer.

Kedua, teori sekuritisasi dan desekuritisasi dari Copenhagen School juga tidak menjawab pertanyaan apa yang menjadi kriteria keberhasilan proses sekuritisasi? Selama ini, Copenhagen School mengukur keberhasilan sekuritisasi berdasarkan keyakinan subyektif yang dibentuk oleh objek referensi tentang ancaman. Penilaian subyektif ini muncul karena sebuah isu dapat dipersepsikan secara berbeda oleh kelompok yang berbeda. Misalnya, masalah rasisme bukanlah ancaman bagi kelompok mayoritas di suatu negara, tetapi merupakan ancaman bagi kelompok minoritas.

Ketiga, Mazhab Kopenhagen bersifat Eurosentris, di mana teori sekuritisasi dan desekuritisasi yang dipelopori oleh Buzan dan kawan-kawan menjadi kurang relevan dalam konteks sekuritisasi di negara-negara Dunia Ketiga, mengingat adanya perbedaan kondisi ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara Eropa dan Dunia Ketiga. Bagaimanapun, teori ini tidak dapat dijadikan acuan untuk menjelaskan dinamika yang seringkali berbeda di negara-negara Dunia Ketiga.

Terakhir, mazhab Copenhagen tidak melihat seberapa efektif tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi ancaman setelah tindakan bicara. Dengan hanya menganggap proses sekuritisasi berhasil berdasarkan keyakinan objek referent terhadap adanya ancaman, teori tersebut tidak dapat menjelaskan dinamika yang sebenarnya. Secara empiris, sekolah Copenhagen tidak menganggap sekuritisasi sebagai solusi untuk mengatasi ancaman (Agus Trihartono dan rekan, 2020).

B. Keamanan Internasional

Secara etimologis, konsep keamanan berasal dari kata Latin "securus" (se + cura) yang berarti bebas dari bahaya dan ketakutan. Pendekatan tradisional, yang didominasi oleh realisme, melihat keamanan sebagai keadaan bebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi diri dari agresi militer negara lain.

Keamanan didefinisikan sebagai kemampuan untuk bertahan dari ancaman nyata. Isu keamanan internasional selalu menjadi isu yang aktif dalam studi hubungan internasional. Dalam studi keamanan internasional yang merupakan salah satu bidang kajian utama, konsep keamanan telah berevolusi dari keamanan tradisional (politik-militer) menjadi keamanan non-tradisional (kemanusiaan dan alternatif). Teks-teks keamanan tradisional yang berlaku pada masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin mengalami anomali (pergeseran dan tantangan) dengan batasan-batasan keamanan yang menitikberatkan pada negara sebagai aktor keamanan utama (key player), sumber ancaman dan pencipta stabilitas keamanan.

Barry Buzan, dalam bukunya *People, States and Fear*, menyatakan bahwa "keamanan, dalam pengertian obyektif, mengukur ketiadaan ancaman terhadap nilai-nilai yang telah diperoleh dan, dalam pengertian subyektif, ketiadaan rasa takut bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang" (Barry Buzan & Ole Waever, 2007). Menurut Barry Buzan, makna dari konsep keamanan tidak hanya mencakup aspek militer dan aktor negara, tetapi juga aspek non-militer dan non-aktor. Dalam bukunya yang berjudul *People, States and Fear*, Buzan membagi keamanan ke dalam lima domain: militer, lingkungan, politik, ekonomi, dan sosial. Aspek militer hanyalah salah satu aspek penting dari dimensi keamanan, tetapi lebih kepada perdamaian dan keamanan. Dimensi keamanan adalah perubahan yang dipahami sebagai multidimensi dan sebagai perlindungan suatu negara dan individu di dalamnya.

Menurut John H. Herz, dalam bukunya yang berjudul *Political Realism and Political Idealism*, dalam konsep keamanan terdapat kondisi suatu negara meningkatkan pertahanan dan keamanan untuk menghindari ancaman eksternal yang menyebabkan negara-negara di sekitarnya merasa terancam dan melakukan tindakan serupa, kondisi tersebut kemudian dapat menimbulkan ketegangan bahkan memicu konflik yang disebut dengan dilema keamanan.

Negara harus mempertimbangkan upaya-upaya yang bersifat defensif, yaitu upaya-upaya yang dirancang untuk mengurangi kemampuan musuh dalam mengendalikan sesuatu oleh negara, dengan tujuan untuk melawan penyerang guna mengurangi kerugian jika upaya pencegahan gagal. Intimidasi adalah membuat ancaman militer terhadap pihak lain dengan tujuan mencegah pihak lain tersebut melakukan tindakan agresif atau melancarkan serangan militer. Hal ini dilakukan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

Keadaan seperti itu mungkin timbul karena kesulitan dalam membangun kepercayaan antar negara, kegagalan komunikasi, faktor sejarah. Pada akhirnya, hal tersebut mempengaruhi persaingan antar negara untuk meningkatkan keamanan masing-masing, membangun aliansi, menciptakan ketegangan dalam situasi internasional, perlombaan senjata dan dapat menyebabkan perang.

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, tatanan dunia telah berubah. Konsep keamanan semakin berkembang dengan munculnya masalah-masalah non-tradisional seperti terorisme, kejahatan siber, isu kemanusiaan dan lingkungan yang berdampak negatif terhadap tatanan dunia. Selain itu, tidak hanya negara yang terlibat, tetapi juga aktor non-negara seperti organisasi kriminal transnasional atau individu yang melakukan kejahatan dan mengganggu stabilitas suatu negara atau bahkan dunia secara keseluruhan. Konsep keamanan baru yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Keamanan umum

Diperkenalkan oleh Komisi Palme antara tahun 1980 dan 1981. Komisi ini menggambarkan apa yang mereka yakini dapat mengubah hubungan antara pihak-pihak yang bertikai dengan menciptakan kebijakan keamanan yang transparan dan tidak agresif bagi kedua belah pihak. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan rasa saling curiga terhadap niat satu sama lain untuk mencegah konflik bersenjata.

2. Keamanan komprehensif

Keamanan ini mencakup semua aspek kehidupan manusia. Negara berkewajiban untuk menjamin tidak hanya keamanan militer secara fisik, tetapi juga keamanan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan bagi seluruh warganya. Dari keamanan ini tumbuh konsep keamanan manusia.

3. Keamanan kooperatif

Bentuk kerja sama keamanan yang paling longgar. Ia menggunakan semua jalur dan mencakup semua aspek keamanan. Bentuk kerjasama yang lunak (tidak transparan, tidak bersifat pengaturan atau penegakan).

Dengan semakin banyaknya isu – isu yang berkembang dalam Hubungan Internasional, keamanan tidak terfokus kepada kekuatan militer saja tetapi juga dapat berkaitan dengan ekonomi internasional, organisasi internasional, hukum internasional Kemudian, UNDP (United Nations Development Programme) mengidentifikasi 7 (tujuh) kategori ancaman yang perlu dicermati secara serius, diantaranya:

1. Keamanan Ekonomi.
2. Keamanan Pangan.
3. Keamanan Kesehatan.
4. Keamanan Lingkungan Hidup.
5. Keamanan Pribadi.
6. Keamanan Komunitas.
7. Keamanan Politik

Keamanan merupakan hal yang sangat penting dan perlu dipenuhi oleh negara karena menyangkut kepada rasa aman dari masyarakatnya itu sendiri. Sehingga, suatu negara dapat terbebas dari ancaman baik dari internal negara itu sendiri maupun eksternal (Burhanuddin Agussalim, 2017).

3. METODE

Peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari para individu maupun perilaku yang diamati. Peneliti memilih desain penelitian ini karena fenomena yang diteliti dapat dieksplorasi dengan menggunakan berbagai sumber data. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis sehingga mempermudah peneliti untuk menyajikan data yang diperoleh secara komprehensif. Peneliti memperoleh data dari sumber data primer seperti dokumen resmi dan sumber data sekunder seperti jurnal, buku, media, dan situs resmi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh John W. Creswell, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya, peneliti menyajikannya dalam bentuk deskriptif analisis, tabel, ataupun grafik yang dapat mendukung informasi mendetail mengenai penelitian ini. Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan yang bersifat interpretasi dari data yang telah dianalisis (Albi Anggito & Johan Setiyawan, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Awal Tradisi Kudeta Militer Myanmar

Dalam sejarah Myanmar, terdapat beberapa kerajaan seperti Kerajaan Pagan, Kerajaan Awa, Dinasti Toungoo dan Dinasti Alaungpaya. Seperti negara-negara lain di Asia Tenggara, Myanmar juga tidak luput dari imperialisme Eropa. Pada tahun 1855, Myanmar ditaklukkan oleh Inggris, mengakhiri kekuasaan Dinasti Alaungpaya, penguasa terakhir Myanmar. Sejak saat itu, periode penjajahan Inggris di Myanmar dimulai. Pada awal abad ke-20, berkembanglah gerakan nasionalisme Myanmar yang didukung oleh para pemuda. Salah satu tokoh yang berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Myanmar adalah Aung San. Di masa mudanya, Aung San aktif memperjuangkan kemerdekaan Myanmar melalui organisasi nasionalis "Dobama Asiayone".

Selama Perang Dunia Kedua, Aung San berkolaborasi dengan Jepang, yang menjanjikan bantuan untuk memerdekakan Myanmar. Aung San kemudian mendirikan Tentara Kemerdekaan Myanmar sebagai pendukung kampanye militer Jepang di wilayah Asia-Pasifik. Namun, menjelang akhir Perang Dunia II, Aung San secara mengejutkan beralih membela Sekutu, karena percaya bahwa Jepang tidak akan menepati janjinya, dan posisinya terus mengalami kekalahan di tangan Sekutu. Pada tahun 1944, Aung San menjadi salah satu pendiri gerakan nasionalis, Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis, yang kemudian menjadi kelompok politik yang memerintah Myanmar setelah Merdeka.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Aung San berusaha untuk bernegosiasi dengan Inggris mengenai nasib masa depan Myanmar. Setelah bernegosiasi dengan Perdana Menteri Inggris Clement Atlee pada tahun 1947, sebuah kesepakatan dicapai di mana Inggris memberikan kemerdekaan Myanmar setahun kemudian. Sayangnya, Aung San tidak sempat menyaksikan kemerdekaan negaranya: ia dan beberapa anggota keluarganya dibunuh oleh lawan politiknya di Rangoon pada tanggal 11 Juli 1947, ketika ia sedang mengadakan rapat bersama dengan kabinetnya. Pada 4 Januari 1948, Myanmar akhirnya memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Setelah kemerdekaan, Myanmar menghadapi beberapa pemberontakan yang mengancam integritasnya, dan pemberontakan ini merupakan awal dari tahun-tahun keterlibatan militer dalam politik Myanmar. Sejak awal kemerdekaan, militer telah mengendalikan politik negara tersebut.

Setelah kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, terjadi pemberontakan oleh kelompok komunis dan kelompok Karen bersenjata. Pada akhir 1950-an, ketika pemberontakan membuat situasi di negara itu semakin berbahaya, pemerintah sipil, yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu pada saat itu, meminta panglima angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Ne Win, untuk mengambil alih pemerintahan dan menstabilkan situasi di Myanmar. Pada tahun 1960, ketika situasi mulai stabil, Ne Win menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintah sipil. Namun, terjadi perpecahan dalam politik dalam negeri Myanmar ketika partai Liga Kebebasan Rakyat yang berkuasa dan anti-fasis terpecah dan perpecahan tersebut mengancam persatuan kubu militer.

Pemerintahan sipil yang saat itu melemah dimanfaatkan oleh Ne Win untuk merebut kekuasaan dalam sebuah kudeta pada tanggal 2 Maret 1962. U Nu dan pejabat pemerintah lainnya ditangkap, dan setelah kudeta, Ne Win ditunjuk sebagai pemimpin baru Myanmar. Ne Win mengubah Myanmar menjadi negara sosialis dengan menjadikan Partai Program Sosialis Burma sebagai satu-satunya partai di Myanmar. Ne Win menasionalisasi ekonomi negara, menjadikan agama Buddha sebagai agama resmi negara, dan menindas segala bentuk oposisi terhadap pemerintah. Sayangnya, krisis ekonomi yang dipicu oleh kebijakan ekonomi Ne Win menyebabkan runtuhnya ekonomi Myanmar pada tahun 1988. Krisis ekonomi Myanmar menyebabkan demonstrasi besar-besaran oleh para mahasiswa yang menuntut Ne Win untuk turun dari kekuasaan. Hal ini menyebabkan sekelompok perwira militer melakukan kudeta terhadap Ne Win pada September 1988. Kudeta tersebut sangat berdarah, dan beberapa pengunjuk rasa dilaporkan terbunuh dalam bentrokan dengan pihak berwenang. Pada tanggal 18 September 1988, pemerintah junta militer yang disebut Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban

Negara dibentuk. Pemerintahan ini melibatkan beberapa perwira tinggi dari militer Myanmar, dan Jenderal Saw Maung ditunjuk sebagai Perdana Menteri (Ramadhani, 2021).

Junta militer mulai membentuk pemerintahan terpusat di mana fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikendalikan oleh militer. Setelah mengambil alih pemerintahan, junta militer berjanji untuk mengadakan pemilihan umum. Pemilu diadakan pada bulan Mei 1990. Hasilnya, partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memenangkan suara terbanyak. Ia adalah putri dari pejuang kemerdekaan Myanmar yang terkenal, Aung San. NLD adalah partai oposisi terhadap pemerintah militer yang sangat populer di kalangan masyarakat. Partai ini sangat aktif dalam mengkritik kekuasaan junta militer. Mengingat popularitas NLD di kalangan penduduk, dan di samping dominasinya, pemilihan umum telah menjadi faktor yang mengancam bagi rezim militer di Myanmar. Pada akhirnya, junta militer tidak mengakui hasil pemilu dan berusaha untuk menahan Aung San Suu Kyi bersama dengan beberapa tokoh NLD lainnya.

Pada tahun-tahun berikutnya, anggota partai dan simpatisan NLD menjadi sasaran perlakuan represif pemerintah. Tindakan represif pemerintah militer dikritik habis-habisan oleh organisasi hak asasi manusia internasional dan negara-negara lain. Pada tahun 1990-an, pemerintah militer Myanmar berusaha membangun infrastruktur yang lebih modern, memobilisasi beberapa sektor ekonomi utama untuk membangun ekonomi, dan mempertahankan berbagai gencatan senjata dengan beberapa kelompok pemberontak.

Pada tahun 1993, pemerintah junta militer mencoba membuat konstitusi baru. Namun upaya tersebut gagal karena kubu politik lain menganggap proses pembuatan konstitusi tidak demokratis. Pada tahun 1995, Aung San Suu Kyi dibebaskan karena tekanan internasional. Dua tahun kemudian, pemerintah berganti nama menjadi Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara. Namun, pada kenyataannya, tidak ada yang berubah dalam pemerintahan kecuali namanya. Konflik antara junta militer dan partai NLD menyebabkan Aung San Suu Kyi kembali melakukan perlawanan pada September 2000 hingga Mei 2002. Demokratisasi di Myanmar dimulai lagi pada tahun 2003, ketika pemerintah militer memulai proses penyusunan konstitusi baru, yang selesai pada tahun 2008. Namun, proses ini terus dimanipulasi oleh militer. Pada tahun 2010, reformasi politik diimplementasikan dengan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin baru Myanmar. Pemilu di mana para kandidat dapat dipilih secara demokratis.

Penyelenggaraan pemilu bukan berarti militer mau melepaskan begitu saja kekuasaan yang dimilikinya, karena militer membuat partai proxy yang bernama Union Solidarity and Development Party (USDP). USDP menjadi alat yang digunakan oleh militer untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya selama demokratisasi yang terjadi di Myanmar pada pemilu 7 November 2010 (Alvin, 2022). USDP memenangkan mayoritas suara dan Thein Sein yang menjadi kandidat presiden dari USDP diangkat sebagai pemimpin baru Myanmar. Banyak yang menduga bahwa hasil pemilu tersebut dimanipulasi oleh militer. Namun, pemilu dan pemilihan pemimpin yang demokratis menandai berakhirnya kekuasaan militer di Myanmar. Namun demikian, pengaruh militer di negara ini masih cukup kuat, sebagian karena USDP dan hak-hak istimewa yang dinikmati militer dalam pemerintahan. Misalnya, mendapatkan kursi khusus di parlemen tanpa pemilihan umum, serta berbagai posisi kekuasaan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan seperti Menteri Pertahanan, Menteri Perbatasan, dan Menteri Dalam Negeri (MANURGARA RARA TALAOHU, 2022).

B. Peran ASEAN Dalam Usaha Pencapaian Perdamaian Kudeta Militer Myanmar 2021

ASEAN adalah sebuah Organisasi Internasional di kawasan Asia Tenggara, sebuah struktur formal yang berkesinambungan dan dibentuk atas dasar kesepakatan antar anggota pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Pembentukan ASEAN dalam

rangka mengejar kepentingan bersama anggota ASEAN itu sendiri yaitu dengan tujuan untuk menciptakan kawasan atau wilayah Asia Tenggara yang aman, damai, stabil dan sejahtera.

Di ASEAN, untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang mungkin timbul, Negara Anggota ASEAN harus membuat kesepakatan untuk membentuk struktur permanen, yang akan diberikan kepada High Council atau Dewan Tinggi, di mana Dewan Tinggi akan menjadi badan perwakilan setingkat menteri dari setiap Negara Anggota ASEAN. Majelis Tinggi ini akan bertanggung jawab atas perselisihan atau situasi yang mungkin timbul kemudian atau mengganggu jalannya perdamaian dan keharmonisan di dalam Organisasi Kerjasama Regional ASEAN. Dewan Tinggi memiliki kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan suatu konflik, kekuasaan ini muncul ketika perselisihan atau pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan secara langsung melalui negosiasi, dan penerapan proses tersebut hanya akan dilaksanakan apabila terdapat persetujuan dari semua pihak yang bersengketa, adapun wewenang Dewan Tinggi adalah sebagai berikut (Silka dkk, n.d.)

1. Menyediakan atau menyarankan para pihak yang berselisih untuk menggunakan cara-cara penyelesaian yang tepat, seperti komisi pemilihan, arbitrase, pencarian fakta, atau konsiliasi; dan
2. Dewan Tertinggi itu sendiri dapat bertindak sebagai penyedia jasa-jasa yang baik; dan
3. dengan persetujuan para pihak yang bersengketa atau berkonflik, Dewan Tertinggi dapat bertindak sebagai komite investigasi, komite arbitrase, atau komite konsiliasi; dan
4. jika perlu, Komite Tertinggi juga dapat berfungsi untuk merekomendasikan kepada para pihak yang bersengketa atau berkonflik untuk mengambil langkah-langkah atau cara-cara yang tepat untuk mencegah sengketa atau konflik meningkat.

Mengacu pada Prinsip dan Tujuan yang terdapat dalam Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Pasal 1 Nomor I: memelihara atau memajukan dan meningkatkan perdamaian, Nomor VII: Memajukan demokrasi dan melindungi hak asasi manusia, ASEAN dapat mengambil peran untuk mendukung kudeta militer dalam rangka memajukan demokrasi dan melindungi hak asasi manusia yang selama ini dilanggar oleh rezim militer yang saat ini masih berkuasa terhadap pemerintah Myanmar. Atas dasar Tujuan dan Prinsip yang dimiliki oleh ASEAN inilah yang kemudian mendasari ASEAN untuk bertindak dalam menyelesaikan permasalahan melalui diplomasinya sendiri atau biasa disebut dengan ASEAN Way (Kusumawardhana, 2021).

ASEAN Way juga merupakan strategi bagaimana ASEAN mengambil keputusan dan bertindak untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan melakukan dialog dan mengambil keputusan untuk mengatasi masalah terkait kudeta militer yang saat ini sedang berlangsung, ASEAN semakin dekat dengan proses pengambilan keputusan yang dapat diambil terkait kudeta di Myanmar, pengambilan kebijakan tidak bisa hanya berdasarkan pendapat dari satu negara anggota saja, kebijakan ini dapat dilaksanakan ketika ada kesepakatan diantara anggota ASEAN terkait Pasal 2, Nomor IV, Piagam ASEAN mengenai penyelesaian masalah secara damai, yang merujuk pada kudeta yang terjadi, Indonesia, Singapura, dan Malaysia juga secara terbuka telah menyampaikan keprihatinannya terhadap kudeta yang terjadi (Faustina Ivana S. , 2021) Di sisi lain, Kamboja, Vietnam, dan Thailand masih memegang teguh prinsip anti-kekerasan. D. J. , 2021, p. 133) disisi lain Kamboja, Vietnam, dan Thailand masih menganut prinsip noninterference, perbedaan pandangan diantara negara anggota ASEAN ini menunjukkan bahwa ASEAN masih mempertimbangkan kebijakan atau langkah yang akan diambil terkait kudeta militer di Myanmar. Pada bulan April 2021, telah diadakan pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta yang menghasilkan 5 keputusan konsensus, yaitu:

1. Kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak yang terlibat harus menahan diri.
2. ASEAN diminta untuk memulai dialog konstruktif di antara semua pemangku kepentingan atas nama rakyat Myanmar untuk menemukan solusi damai.
3. Para Pemimpin ASEAN sepakat untuk menyediakan sarana untuk dialog tersebut dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

4. ASEAN setuju untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar.
5. Para Pemimpin ASEAN sepakat bahwa utusan atau delegasi khusus harus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan terkait masalah ini.

Dari konsensus di atas, dapat dipahami bahwa ASEAN adalah organisasi internasional dan perannya adalah sebagai wadah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seperti forum, asosiasi, dan forum konsultatif, serta tempat merumuskan dan memprakarsai terbentuknya konsensus internasional. Salah satu hambatan peran ASEAN dalam kudeta militer di Myanmar adalah prinsip non-interference. Adanya prinsip non-interference yang dimiliki oleh ASEAN juga merupakan prinsip yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN dalam menciptakan perdamaian dan demokrasi regional terkait kudeta militer di Myanmar. Dalam hal dinamika di Myanmar, kudeta militer yang terjadi di Myanmar diprakarsai oleh junta militer Myanmar, dalam hal ini junta militer merupakan pemimpin atau penguasa yang tirani dan oleh karena itu penjaga demokrasi tidak ada, dan jika demokrasi tidak ada, maka berdampak pada isu-isu utama seperti pelanggaran HAM, krisis ekonomi dan lain sebagainya (Alissa, 2022).

Efektivitas ASEAN (Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara) dalam usaha pencapaian perdamaian terkait kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 telah menjadi topik yang kontroversial dan mendapat banyak sorotan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya ASEAN dalam konteks ini melibatkan kebijakan luar negeri, struktur organisasi, dan dinamika internal di antara negara-negara anggotanya. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi efektivitas ASEAN dalam menghadapi situasi Myanmar (Ebbighausen, 2021):

1. Prinsip Non-Intervensi: ASEAN diawali dengan prinsip non-intervensi dalam urusan internal anggota-anggotanya. Prinsip ini dapat membatasi kemampuan ASEAN untuk campur tangan secara langsung dalam konflik internal di salah satu negara anggota, termasuk kudeta militer di Myanmar.
2. Kohesivitas dan Solidaritas Internal: Tingkat kohesivitas dan solidaritas di antara anggota ASEAN dapat mempengaruhi kemampuan organisasi ini untuk merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah bersama. Jika terdapat perpecahan atau perbedaan pendapat di antara anggota ASEAN, hal ini dapat melemahkan usaha bersama untuk mencapai perdamaian di Myanmar.
3. Diplomasi dan Mediasi: ASEAN memiliki sejarah dalam menggunakan pendekatan diplomasi dan mediasi dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks Myanmar, upaya ASEAN untuk memediasi dialog antara pihak militer dan pihak oposisi serta pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi faktor penentu dalam mencapai perdamaian.
4. Kerja Sama Regional dan Internasional: Kerja sama dengan pihak-pihak regional dan internasional juga dapat memainkan peran penting. Upaya ASEAN untuk bekerja sama dengan organisasi dan negara-negara lain dapat meningkatkan pengaruh dan efektivitasnya dalam menangani krisis di Myanmar (KEMENLU RI, 2019).
5. Tekanan Internasional: Tekanan dari masyarakat internasional terhadap ASEAN untuk mengambil tindakan tegas terhadap kudeta militer di Myanmar dapat memengaruhi respons dan langkah-langkah yang diambil oleh organisasi ini.
6. Ketersediaan Pihak Myanmar untuk Berdialog: Efektivitas upaya perdamaian ASEAN juga sangat tergantung pada ketersediaan pihak militer Myanmar untuk berdialog dan bekerja sama dengan upaya mediasi. Jika pihak Myanmar menolak atau tidak kooperatif, ini dapat membuat upaya ASEAN lebih sulit untuk mencapai hasil yang positif.

Penting untuk diingat bahwa setiap situasi krisis memiliki dinamika dan kompleksitasnya sendiri. Faktor-faktor di atas mungkin saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks upaya ASEAN untuk mencapai perdamaian terkait kudeta militer di Myanmar.

5. KESIMPULAN

Perlu kita ketahui bahwa ASEAN memang merupakan organisasi regional di Asia Tenggara yang sangat berpengaruh terhadap kerjasama bilateral ataupun multilateral setiap negara anggota ASEAN. Dalam penanganan kasus kudeta militer di Myanmar tahun 2021, ASEAN tidak terlalu efektif mengingat ASEAN sendiri menganut sistem konsensus atau prinsip Non-Intervensi membuat ASEAN tidak dapat langsung mencampuri konflik internal suatu negara. Sehingga segala hal yang terjadi di dalam negeri masing-masing negara anggota, terutama yang menyangkut politik, tidak boleh diganggu oleh negara anggota ASEAN. Dalam hal ini masyarakat dunia tentunya akan terus memberikan tekanan kepada ASEAN agar segera mengatasi konflik tersebut, namun ASEAN sendiri juga tidak bisa berbuat banyak. Yang dapat dilakukan oleh ASEAN kemungkinan hanyalah dapat memberikan sanksi sosial kepada Myanmar seperti embargo ekonomi atau pemutusan kerja sama bilateral atau multilateral.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Agus Trihartono, Suryani Indriastuti, & Chairun Nisya. (2020). *KEAMANAN DAN SEKURITISASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL*. www.melvanamedia.com
- [2] Albi Anggito, & Johan Setiyawan. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Ela Deffi Lestari, Ed.). CV Jejak.
- [3] Alissa. (2022, July 19). *Organisasi Internasional: Definisi, Sejarah, Jenis dan Keanggotaan Indonesiaan*. Retrieved from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/organisasi-internasional/>
- [4] Alvin, S. (2022). The Evolution of Political Party in Indonesia: PSI Towards a Digital Party. E-Journal Universitas Tarumanagara, 21.
- [5] Barry Buzan. (1998). *Security: A New Framework for Analysis* (Ole Waever, Ed.). Lynne Rienner Publishers.
- [6] Barry Buzan, & Ole Waever. (2007). *People, States and Fear* (2 ed.). ECPR PRESS.
- [7] Burhanuddin Agussalim. (2017). *STUDI KEAMANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS GLOBAL*. LKPP Universitas Hasanuddin.
- [8] Ebbighausen, R. (2021, March 31). Kudeta Myanmar: Sikap ASEAN yang Terpecah. Retrieved from DW Made for Minds: <https://www.dw.com/id/sikap-asean-yang-terpecah-atas-myanmar/a-57052708>
- [9] Imanuddin Imran. (2022). *LEGITIMASI KUDETA OLEH MILITER MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL* [Hukum Internasional]. Universitas Hasanuddin.
- [10] KEMENLU RI. (2019, March 1). KERJASAMA EKSTERNAL ASEAN. Retrieved from KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA: https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/15/halaman_list_lainnya/kerja-sama-eksternal-asean
- [11] Kusumawardhana, I. (2021). Mengapa Rezim Internasional Gagal? Analisis Legalisasi “Lima Poin Konsensus ASEAN” tentang Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021. Dalam *Indonesian Perspective* (Vol. 7, Issue 1).

- [12] MANURGARA RARA TALAOHU. (2022). *UPAYA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KRISIS POLITIK PASCA KUDETA MYANMAR 2021*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- [13] Mely Caballero-Anthony. (2006). Non-state regional governance mechanism for economic security: the case of the ASEAN Peoples' Assembly. *The Pacific Review*.
- [14] Novriest Umbu Walangara Nau. (t.t.). *Efektivitas Pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation Dalam Menangani Konflik di Kawasan Asia Tenggara*. 3(1), 1–32.
- [15] Ralf Emmers. (2017). *Non-Traditional Security In Asia: Dilemmas In Securitisation* (Mely Caballero-Anthony, Ed.; Revisi). Routledge.
- [16] Ramadhani, Z. (2021). Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar. *Global Political Studies Journal*, 5. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i2>
- [17] Silka, D., Faustine, C. J., Cayetha, G. A., Kurniawan, M., Suhairy, N., & Anastasia, V. (t.t.). *Mengukur Efektivitas Preventive Diplomacy Indonesia Di ASEAN dalam Menanggapi Konflik Kudeta Militer Myanmar 2021*. <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-asean-idUSKBN2BS0HB>.